



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI:
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP KELUARGA TERDAMPAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Wewen Kusumi Rahayu

Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas

ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Article history:

Received date: 12 Maret 2022

Revised date: 21 April 2022

Accepted date : 22 April 2022

The Covid-19 Pandemic has caused many changes to all social life structures. Public activities that must be carried out in the domestic space cause new problems for each family member. The educational process must be carried out at home for a long time, making the role of parents change to being teachers with the obligation to accompany and provide online learning facilities. On the other hand, work that must also be done at home affects the family's economic condition. Not a few families have been affected by this pandemic, such as a decrease in income, to domestic violence and even divorce. This problem causes women as wives to carry out multiple roles and becomes a separate problem that must be resolved. This study aims to analyze the effort of local governments through the concept of Collaborative Governance as an effort to empower women in affected families.

Using descriptive qualitative methods, it is known that the Padang City Government responds to this by maximizing the role of all stakeholders. The way to do this is to build collaboration between the government and community leaders, business actors and academics at universities to provide education and skills to women in affected families to become independent and empowered. Education, among others, is in the form of learning assistance for children of affected families carried out by final year students. Economic improvement is carried out through empowering the concept of agricultural cooperatives by accommodating agricultural products and Micro Business of affected families and distributing them online. The success of this effort to re-empower women's independence in affected families has become a consideration for local governments to further vary work programs in the form of education and skills assistance. Not always on social fund assistance programs.

Keywords : Collaborative Governance, Women, Pandemic, Affected

ABSTRAKSI

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyaknya perubahan kepada semua tatanan kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan publik yang harus dilakukan pada ruang domestik menyebabkan permasalahan baru pada setiap anggota keluarga. Proses pendidikan yang harus dilakukan di rumah dalam waktu cukup lama, membuat peran orang tua berganti menjadi guru dengan kewajiban mendampingi dan menyediakan sarana pembelajaran yang dilakukan secara online. Disisi lain, pekerjaan yang juga harus dilakukan di rumah memberi pengaruh kepada kondisi perekonomian keluarga. Tidak sedikit keluarga yang terdampak dengan kondisi pandemi ini seperti penurunan pendapatan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan perceraian. Permasalahan ini menyebabkan perempuan sebagai istri mengemban peran ganda dan menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah melalui konsep Collaborative Governance sebagai upaya memberdayakan perempuan pada keluarga yang terdampak.

Menggunakan metode kualitatif deskriptif diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang menyikapi hal ini dengan memaksimalkan peran semua stakeholder. Cara yang dilakukan adalah dengan membangun kerjasama antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, pelaku usaha dan akademisi pada perguruan tinggi untuk memberikan edukasi dan ketrampilan kepada perempuan pada keluarga terdampak agar kembali mandiri dan berdaya. Edukasi antara lain berupa pendampingan belajar bagi anak-anak keluarga terdampak yang dilakukan oleh mahasiswa tahun akhir. Perbaikan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan konsep koperasi pertanian dengan menampung hasil pertanian dan UMKM keluarga terdampak dan didistribusikan secara online. Berhasilnya upaya ini memberdayakan kembali kemandirian perempuan pada keluarga terdampak menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah agar lebih memfasiasikan program kerja pda bentuk pendampingan edukasi dan ketrampilan. Tidak selalu pada program bantuan dana sosial.

Kata Kunci; *Collaborative Governance, Perempuan, Pandemi, Terdampak*

2022 UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pandemi akibat virus Covid-19 di Indonesia menyebabkan pembatasan kegiatan pada area publik, bahkan sampai mengharuskan pemindahan kegiatan tersebut pada area domestik atau rumah tangga. Watts (1987) menyebutkan juga bahwa mobilitas penduduk dapat menyebabkan penyakit menular untuk berpindah ketempat yang baru sehingga menginfeksi penduduk di tempat yang baru (Dzulfikri Muhammad, 2021). Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa kepada semua sektor kehidupan, antara lain bidang pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, dan tentunya bidang kesehatan masyarakat. Bidang Pendidikan mengharuskan proses pembelajaran di sekolah dipindahkan ke rumah dan dilakukan secara *online* dengan menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran, seperti *zoom meet*, *classroom*, *Microsoft teams*, dan lainnya. Pada tataran implementasi, pembelajaran *online* membutuhkan dukungan perangkat mobile seperti smartphone atau ponsel android, laptop, komputer, tablet, dan sebagainya (Sitanggung, 2021). Sekurangnya sebuah keluarga harus memiliki laptop atau handpohone yang bisa mengakses aplikasi pelajaran yang digunakan.

Selain itu, metode belajar secara *online* menambah pengeluaran keluarga untuk pembelian kuota atau paket internet. Orang tua dituntut bisa mendampingi dan membantu anak-anak mereka dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar secara *online*. Permasalahan yang muncul bahwa tidak semua orang tua bisa bekerja dari rumah. Terkadang orang tua tetap harus keluar rumah untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Dilain hal, orang

tua perempuan (ibu) sering dituntut untuk dapat mendampingi proses belajar secara *online* di rumah, namun pada waktu yang sama ibu juga harus melakukan pekerjaan mencari nafkah tambahan bahkan nafkah utama. Tidak jarang kondisi seperti ini justru memunculkan masalah baru pada keluarga. Relasi gender yang tidak setara dalam keluarga sangat penting dilakukan untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Penerapan pembatasan jarak sosial berarti sebagian besar aktivitas di tempat umum harus dilakukan di rumah. Feminisme intersektoral merupakan salah satu konsep feminisme yang sangat penting untuk melihat perbedaan situasi yang dihadapi perempuan dan kelompok marginal selama pandemi Covid-19. Secara umum, beban keluarga yang semakin berat saat terjadi pandemi pasti akan berdampak pada perempuan (Agustina et al., 2021). Sejak pandemi Covid-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara dunia (UN Women, 2021). Permasalahan genting ini membuat UN Women, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani pemberdayaan perempuan, meluncurkan kampanye kesadaran publik atas *Shadow Pandemic--tren* peningkatan kasus KDRT di tengah krisis Covid-19 (Agustina et al., 2021).

Kota Padang sebagai salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami berbagai macam dampak akibat kondisi pandemi Covid- 19 ini. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya lonjakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat warga miskin di Kota Padang bertambah hingga ratusan Ribu orang. Kepala Dinas Sosial (Dinsos)

Kota Padang Afriadi mengatakan, terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di Kota Padang sebanyak 144 ribu orang yang terjadi sejak 3 bulan awal munculnya virus Covid-19. (*Dampak Covid-19, Warga Miskin Padang Bertambah 144 Ribu Jiwa — Lintas Sumbar*, n.d.). Perubahan kondisi ekonomi dan bertambahnya aktifitas sosial di dalam keluarga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Kota Padang terjadi kasus KDRT yang cukup tinggi, yaitu pada 2020 sebanyak 32 kasus sedangkan 2021 meningkat menjadi 47 kasus (*Nurani Perempuan Catat Sepanjang 2021 Angka KDRT Dan Kekerasan Seksual Di Padang Meningkat - Haluan Padang*, n.d.).

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya peran dan juga beban perempuan. Kondisi ini mengindikasikan adanya relasi yang tidak sama antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut juga dengan kondisi yang bias gender. Bias merupakan kondisi yang memihak atau merugikan, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Bias gender merupakan suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi gender (*Konsep Gender Bias Dan Praktik Serta Kondisi Dalam Lingkup Bisnis Di Indonesia – Srikandi BUMN Indonesia*, n.d.). Bias gender pada kategori ini dapat dilihat dalam empat bentuk, yaitu (1) aktivitas yang secara tradisional dianggap layak dilakukan oleh gender tertentu, (2) aktivitas yang secara tradisional biasa dilakukan oleh gender tertentu, (3) aktivitas yang memang dilakukan gender tertentu demi gender lain, dan (4) aktivitas yang secara kodrati hanya bisa dilakukan gender tertentu dan aktivitas yang mendiskreditkan atau bermakna negatif pada gender tertentu (Isnani Setyaningsih Sri Isnani Setyaningsih Sri Isnani Setyaningsih & Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Bias gender tentunya akan membuat sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Rahayu, 2017). Berdasarkan konsep

bias gender tersebut, maka diketahui bahwa nilai konstruksi budaya yang membuat perempuan seolah memiliki peran ganda. Hal ini merujuk kepada salah satu bentuk bias gender yang menyatakan bahwa suatu kegiatan hanya dilakukan oleh salah satu gender saja, seperti pengasuhan anak di rumah. Sehingga ibu harus mendampingi ketika anak belajar dari rumah secara online selama masa pandemi. Dilain sisi, tidak sedikit perempuan yang juga menjadi pencari nafkah tambahan ataupun nafkah utama keluarga, sehingga menjalankan peran ganda. Melihat kondisi tersebut, maka dirasa sangat perlu untuk membuat perempuan menjadi lebih berdaya dan mandiri dalam melaksanakan semua aktivitas pada masa pandemi Covid-19.

Salah satu bentuk penelitian pemberdayaan perempuan ditulis oleh Diana Kurnia Putri (2018), menyimpulkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Desa baik dalam bentuk keterampilan maupun dalam hal pengelolaan dana (Khiftiyah & Nilamsari, n.d.)

Melihat hasil penelitian tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Padang seharusnya juga bisa memberdayakan setiap perempuan pada keluarga terdampak sepanjang masa pandemi Covid-19. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, diantaranya menerapkan konsep kolaborasi dengan semua *stakeholders*. Konsep ini dikenal dengan *Collaborative Governance*, yaitu suatu kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan. Menurut Osborne (2010) *Public governance* berisi lima hal sebagai berikut (Luh & Dewi, 2019);

1. *Socio-political governance*: menyangkut hubungan antar institusi dalam masyarakat.
2. *Public policy governance*: berkaitan dengan bagaimana elite membuat kebijakan beserta jaringannya berinteraksi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
3. *Administrative governance*: menyangkut efektivitas penerapan administrasi publik

dan reposisinya untuk menangani masalah-masalah pemerintah.

4. *Contract governance*: berkaitan dengan penerapan NPM, dipandang perlu adanya kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan publik (perjanjian antara penyedia pelayanan publik dengan pihak penerima pelayanan). Organisasi publik pada negara-negara modern memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan publik yang baik.
5. *Network governance*: merupakan jaringan kerja sama mandiri antar organisasi pemerintah atau tanpa organisasi pemerintah dalam penyedia pelayanan publik.

Melihat konsep *Collaborative Governance*, maka Pemerintah Kota Padang melakukan kolaborasi dengan berbagai unsur relasi yang berkompeten dalam bidang pemberdayaan perempuan. Pihak yang dimaksud adalah para akademisi, tokoh masyarakat dan pihak swasta. Untuk mengetahui bentuk *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan teori Ansell and Gash yang menyatakan bahwa *Collaborative Governance* adalah pengaturan yang mengatur kegiatan satu lembaga atau lebih dengan melibatkan swasta dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus dan *deliberative* dengan menggunakan musyawarah untuk membuat kebijakan publik, mengelola program atau aset publik (Ade Febrian; 2006).

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Hansel and Gash, yang menyatakan empat model dalam upaya pengembangan *collaborative governance* (Ansell & Gash; 2007: 550), yaitu;

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal), dapat dilihat dari;
 - a. Ketidakseimbangan Sumber Daya, disebabkan oleh kondisi pemangku kepentingan yang tidak memiliki kapasitas, kemampuan sumberdaya untuk berpartisipasi dan hubungan dengan aktor lainnya. Kapasitas bisa dilihat dari kemampuan, ketrampilan, sikap dan hubungan antar sumber daya dalam sebuah organisasi.

- b. Insentif dalam berpartisipasi, dilihat dari motivasi atau bentuk dorongan atas partisipasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Motivasi dan dorongan tidak selalu berupa uang, namun leboh kepada nilai-nilai yang dipegang bersama oleh anggota organisasi.

2. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan yang fasilitatif), dilihat dari kemampuan pemimpin dalam memfasilitasi dalam berkomunikasi dan melakukan pendekatan dan kerjasama dengan kelompok atau pihak lain.
3. *Institutional Design* (Desain Lembaga), dapat dilihat dari partisipasi, aturan dan bentuk keterbukaan antar actor yang terlibat.
4. *The Collaborative Process* (Proses Kolaborasi), dapat dilihat dari;

- a. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*), berupa komunikasi langsung antar semua stakeholder yang terlibat.

- a. Membangun kepercayaan (*Trust Building*), antara semua stakeholders yang terlibat pada setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan.

- b. Komitmen bersama (*Commitment to Process*), akan mempengaruhi kinerja setiap stakeholders. Komitmen menjadi dasar tumbuhnya rasa percaya antar setiap aktor yang terlibat dan menjalankan program kolaborasi.

- c. Pemahaman bersama (*Understanding*), setiap stakeholder harus memiliki persepsi yang sama atas program yang dilaksanakan secara bersama dengan semua stakeholder yang terlibat.

- d. Hasil sementara (*Intermediate Outcome*), merupakan hasil sementara atas proses kolaborasi yang dilakukan.

Teori Ansell and Gash digunakan karena adanya fenomena awal yang dirasa sesuai dengan konsep yang dikembangkan dalam *collaborative governance*. Fenomena tersebut diantaranya, adanya pelibatan aktor lain selain pemerintah. Aktor yang dimaksud antara lain, perguruan tinggi, pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki usaha berupa UMKM.

Penelitian ini relevan dengan kondisi yang berkembang karena bertujuan untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam masa pandemi

covid-19. Usaha yang akan dianalisis khususnya adalah pada bidang pendidikan dan usaha ekonomi mikro masyarakat, karena dirasa cukup terdampak pada saat pandemi. Selain itu Pemerintah Kota Padang sangat konsisten dalam upaya perbaikan kondisi pada bidang pendidikan dan bidang usaha ekonomi mikro tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara apa adanya (Sugiyono, 2013:8). Data dan informasi didapatkan dengan teknik wawancara kepada stakeholders yang terlibat, yaitu; (1). Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, (2). Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, (3). Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, (4). Akademisi bidang ekonomi dan sosial Universitas Andalas, (5). Tokoh masyarakat bidang kebudayaan, (6). Pelaku UMKM, (7). Mahasiswa, (8). Pasangan suami istri keluarga terdampak. Selain dengan wawancara, peneliti juga melakukan observasi terkait upaya yang dilakukan oleh stakeholders yang berkolaborasi.

Proses penelitian dilakukan dengan penelusuran berbagai informasi pada media massa *online*, dokumen-dokumen laporan kinerja pemerintah daerah dan pengumpulan informasi dari setiap informan. Informasi tersebut kemudian dikelompokkan dan dilakukan analisis terkait dengan variabel yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dilapangan menunjukkan upaya kolaborasi pemerintah Kota Padang dalam bentuk membangun kerjasama dengan stakeholders dari unsur perguruan tinggi dan pelaku usaha. Kerjasama dibidang Pendidikan dilakukan dengan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi di Kota Padang, salah satunya Universitas Andalas. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang maka Universitas Andalas sudah seharusnya menjadi bagian pendorong perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar lingkungan kampus. Menyadari peluang ini, maka pemerintah Kota Padang menjalin kerja sama dengan Universitas Andalas dalam bentuk

penyediaan tenaga pengajar bagi siswa sekolah dasar yang harus melakukan pembelajaran di rumah. Kolaborasi dalam bentuk kerjasama ini disambut baik oleh pimpinan universitas Andalas dan membuat keputusan bahwa pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dilakukan di daerah-daerah dengan bentuk kegiatan pendampingan proses belajar bagi siswa sekolah. Kegiatan ini memberikan pengaruh positif kepada kemampuan belajar siswa khususnya mereka yang tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua. Orang tua yang harus melakukan pekerjaan di luar rumah tetap bisa memantau perkembangan proses belajar anak-anak dari mahasiswa yang memberikan pendampingan pembelajaran. Proses pendampingan ini dapat berupa latihan pengerjaan tugas yang telah diberikan oleh pihak sekolah.

Dari seluruh jumlah penduduk Kota Padang tahun 2018 berjumlah 939.112 jiwa, 50,02 persen diantaranya adalah laki-laki dan 49,98 persen perempuan (BPS, PDA 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk umumnya berimbang. Bila dilihat dari kelompok umurnya, dari jumlah tersebut 36,06% atau 338.641 jiwa adalah anak-anak (penduduk usia di bawah 19 tahun), terdiri dari 171.081 anak laki-laki dan 167.560 anak perempuan. Dengan jumlah anak yang begitu besar atau lebih dari sepertiga jumlah penduduk Kota Padang, maka peningkatan kualitas hidup anak perlu mendapat perhatian serius (DP3APKB Kota Padang, 2019). Sangat perlu penjaminan penerimaan dan akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak. Masa pandemi Covid-19 tentu menjadi masa yang sulit untuk mewujudkan layanan pendidikan yang baik. Ditemukan masih banyak anak usia sekolah dasar yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Kondisi ini diakibatkan karena pembelajaran dilakukan dari rumah secara online mulai dari jenjang pendidikan TK hingga perguruan tinggi. Anak-anak usia TK yang seharusnya mulai dikenalkan cara membaca dan menulis, terpaksa tidak mendapatkan pendampingan tersebut dengan baik.

Pendampingan membaca dan menulis diharapkan dilakukan oleh orang tua di rumah. Mengingat perbedaan kesibukan dan karakteristik setiap orang tua, menyebabkan tidak sedikit anak-anak usia TK yang akhirnya abai dengan kemampuan membaca dan menulis, sehingga

kesulitan saat masuk pendidikan jenjang sekolah dasar.

Pada kondisi inilah kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan mahasiswa yang memberikan pendampingan dengan tujuan memperbaiki capaian pembelajaran pada masa pandemi.

Kolaborasi lainnya dilakukan dalam bidang usaha mikro dilakukan dengan membangun kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan masyarakat yang memiliki produk atau hasil pertanian atau kebutuhan pokok lainnya. Melalui program Toko Tani Center Indonesia, Dinas Pangan memasak kebutuhan pokok dari masyarakat dan mendistribusikan melalui bazar secara offline dan memasarkan secara online dengan harga yang lebih murah. Selain itu, juga dibangun kerjasama dengan koperasi yang beranggotakan masyarakat penghasil kebutuhan pokok. Kolaborasi dalam bentuk kerjasama pada bidang usaha mikro masyarakat ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat akibat menurunnya daya beli masyarakat dan mempertahankan usaha masyarakat pada sektor perdagangan.

Dua bentuk kolaborasi ini akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori Ansell and Gash;

1. Kondisi Awal (Starting Conditions) dilihat dari;

Perbedaan sumber daya yang dilihat dari kapasitas stakeholders dalam mengelola kerjasama yang dilakukan. Kerjasama pada bidang Pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Padang, pemerintah kecamatan dan Universitas Andalas. Kapasitas yang dimaksud adalah kompetensi atau kemampuan semua pihak dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pendidikan Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan jumlah siswa yang membutuhkan pendampingan dalam proses belajar. Kriteria siswa yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa dari keluarga yang ibunya bekerja dan menjadi pencari nafkah utama. Setiap siswa dibuatkan kelompok belajar dengan memperhatikan jumlah siswa dan ruang belajar yang tersedia, agar tetap bisa menerapkan protokol Kesehatan.

Tabel 1
Jumlah KK Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Tingkat Kecamatan
di Kota Padang tahun 2021

N O	Nama Kecamatan	Jumlah KK Istri Pencari Nafkah Utama	Jumlah Anak Usia Sekolah pada Keluarga Terdampak yang mengikuti Pendampingan	Jumlah Kelompok Belajar Pendampingan Masa pandemi
1	Bungus Teluk Bangus	57	61	10
2	Lubuk Kilangan	91	53	10
3	Lubuk Begalung	112	88	12
4	Padang Selatan	31	28	5
5	Padang Timur	53	57	10
6	Padang Barat	33	20	5
7	Padang Utara	36	18	5
8	Nanggalo	52	22	5
9	Kuranji	83	51	10
10	Pauh	36	16	5
11	Kota Tengah	40	25	5

Sumber; Olahan peneliti dari dokumen BPS dan Dinas Pendidikan Kota Padang, 2021

Tabel di atas memperlihatkan jumlah keluarga yang istri atau ibu menjadi pencari nafkah utama pada setiap kecamatan di Kota Padang, sehingga mengharuskan bekerja di luar rumah. Kondisi ini tentu membuat mereka tidak bisa mendampingi anak-anak usia sekolahnya untuk belajar dari rumah. Kolaborasi yang dilakukan pada bidang pendidikan ini, membentuk kelompok belajar dan setiap kelompok belajar didampingi oleh mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan KKN. Pendampingan kelompok belajar ini menjadi salah satu kegiatan unggulan dan pilihan yang dilakukan oleh peserta KKN.

Tidak semua siswa sekolah dari keluarga terdampak mengikuti pendampingan pembelajaran ini, karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat kelompok sasaran secara menyeluruh. Sosialisasi ini menjadi tugas setiap pemerintah kecamatan, kenyataannya kondisi staf kecamatan yang berbeda dari segi jumlah menyebabkan sosialisasi juga berbeda. Selain itu kondisi geografis setiap kecamatan juga menjadi hal yang mempengaruhi keberhasilan pendampingan pembelajaran ini.

Proses pendampingan pembelajaran dilakukan sekurangnya 3 bulan pada setiap kelompok belajar. Jadwal ini melebihi masa KKN, namun karena mahasiswa adalah penduduk setempat maka penambahan jadwal ini tidak menjadi permasalahan. Sambutan baik didapatkan dari orang tua siswa, karena anak-anak tetap bisa mengerjakan tugas sekolah dan paham dengan materi pembelajaran tanpa mengganggu aktifitas dan pekerjaan orang tua. Dinas Pendidikan Kota Padang melakukan pengawasan dan evaluasi kepada setiap kelompok belajar baik secara langsung maupun melalui guru yang berada pada lokasi pelaksanaan pendampingan kelompok belajar.

Pada akhir pekan, pendampingan kelompok belajar memberikan pendampingan kepada para orang tua, khususnya ibu-ibu pada keluarga terdampak. Pendampingan yang dilakukan adalah berupa memberikan pelatihan ketrampilan dan informasi umum mengenai cara hidup lebih baik pada masa pandemi. Untuk pendampingan skill dan informasi kesehatan mental ini diberikan oleh nara sumber yang kompeten terkait dengan tema yang diberikan. Pemberian informasi mengenai kesehatan mental dirasa perlu, karena pada masa pandemi perempuan lebih rentan terdampak dibandingkan dengan laki-laki. Hasil penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa wanita berisiko lebih tinggi mengalami depresi (Liu, Zhang, Wei, Jia, Shang, Sun, dkk, 2020). Wanita lebih rentan terhadap stres dan gangguan stres pascatrauma dibandingkan pria (Liu dkk, 2020). Dalam penelitian terbaru, prevalensi kecemasan dan depresi serta stres selama pandemi Covid-19 terbukti lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria (Liu, dkk, 2020) (Nurmina et al., 2020)

Tabel 2
Daftar Kegiatan Pendampingan kepada Perempuan Pencari Nafkah Utama

N O	Kecamatan	Kegiatan Pendampingan terhadap Perempuan pencari Nafkah Utama	Jumlah Peserta (orang)	Nara Sumber
1	Bungus Teluk Bangus	Membuat masker dan pengolahan makanan dengan bahan dasar ikan	23	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Lubuk Kilangan	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> Sosialisasi kesehatan mental perempuan	15	Dinas Koperasi dan UMKM, Mahasiswa farmasi, Praktisi dan akademisi jurusan Psikologi Universitas Andalas
3	Lubuk Begalung	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> Sosialisasi kesehatan mental perempuan	41	Dinas Koperasi dan UMKM, Mahasiswa Farmasi, Akademisi Jurusan Psikologi Universitas Andalas
4	Padang Selatan	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> , Sosialisasi kesehatan mental perempuan	12	Dinas Koperasi dan UMKM Mahasiswa Farmasi, Akademisi Jurusan Psikologi Universitas Andalas
5	Padang Timur	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> Sosialisasi	20	Dinas Koperasi dan UMKM Mahasiswa Farmasi,

		kesehatan mental perempuan		Akademisi Jurusan Psikologi Universitas Andalas					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Padang Barat	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> , Sosialisasi kesehatan mental perempuan	14	Dinas Koperasi dan UMKM Mahasiswa Farmasi, Akademisi Jurusan Psikologi Universitas Andalas	10	Pauh	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> , Sosialisasi upaya mandiri dalam masa pandemi	15	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Padang Utara	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> , Sosialisasi upaya mandiri dalam masa pandemi	15	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	Koto Tangah	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> Sosialisasi kesehatan mental perempuan	10	Dinas Koperasi dan UMKM Mahasiswa Farmasi, Akademisi Jurusan Psikologi Universitas Andalas
8	Nanggalo	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> , Sosialisasi upaya mandiri dalam masa pandemi	19	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p><i>Sumber; Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2021</i></p> <p>Pada tabel 2 diketahui bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan atau memandirikan perempuan pada keluarga terdampak di setiap kecamatan. Meskipun belum semua sasaran yang mengikuti kegiatan ini, namun diketahui bahwa setelah mengikuti kegiatan pendampingan ini, peserta tersebut melakukan aktifitas yang lebih produktif pada waktu luang, diantaranya bisa menjahit masker dan dipasarkan sendiri.</p> <p>Untuk bidang ekonomi, khususnya kegiatan usaha mikro, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat ataupun kelompok tani masyarakat untuk bermitra dalam penyediaan bahan pokok pangan kebutuhan masyarakat. Kriteria masyarakat pelaku usaha mikro yang bermitra dengan Dinas Pangan adalah pelaku usaha perempuan dan menjadi pencari</p>				
9	Kuranji	Membuat masker dan <i>hand sanitizer</i> , Sosialisasi upaya mandiri dalam masa pandemi	12	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak					

nafkah utama di keluarga. Produk pangan yang dibeli langsung dari masyarakat akan membantu kondisi ekonomi masyarakat terdampak yang berprofesi sebagai petani atau peternak. Produk-produk pangan tersebut nantinya akan dipasarkan dengan cara membuka bazar ataupun didistribusikan secara *online* dengan harga yang murah dari harga pasaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang secara ekonomi terdampak maka akan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Aktor yang terlibat dalam usaha ini dinilai juga cukup memiliki kemampuan dan komitmen dalam menjalankan perannya. Maka upaya kolaborasi dalam usaha mikro masyarakat ini juga bisa dilakukan dengan baik.

Kegiatan usaha mikro masyarakat dilakukan dengan menyediakan fasilitas mobil operasional yang bisa digunakan untuk mendistribusikan bahan pangan, gedung penyimpanan stok pangan hingga menyediakan web pemesanan pangan secara online. Ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM juga telah memfasilitasi pelaksanaan kolaborasi dengan unsur pelaku usaha dan masyarakat.

2. Kepemimpinan Fasilitasi (Facilitative Leadership)

Kepemimpinan fasilitasi dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM didalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

Pada kegiatan pendampingan pembelajaran, Dinas Pendidikan menyediakan materi pembelajaran dan juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan menjadi pendamping pada proses kelompok belajar siswa di rumah. Cara yang dilakukan oleh dinas pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan telah memenuhi dan menjalankan perannya, meskipun telah membangun kerjasama dengan pihak lain sebagai perpanjangan tangan aktor pelaksana.

Dalam memberdayakan perempuan terdampak juga dilakukan kerjasama dengan akademisi pada bidang psikologi dan farmasi. Informasi yang disampaikan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi mendalam pada perempuan terdampak di setiap tingkat kecamatan diberikakn secara langsung oleh pihak

yang berpengalaman dan berkompeten pada bidangnya. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara dua arah, yaitu praktek langsung untuk kegiatan yang menghasilkan output pruduk atau ketrampilan, seperti membuat masker dan cairan pembersih tangan. Bentuk lainnya adalah adanya ruang berbagi cerita yang didampingi langsung oleh psikolog. Ruang ini bertujuan agar peserta mau menyampaikan kondisi dan permasalahan yang dihadapinya dengan harapan psikolog bisa memberikan saran dan solusi atas kondisi yang ada.

3. Desain Lembaga (Institutional design)

Desain lembaga dilihat dari partisipasi stakeholders dalam menjalankan perannya masing-masing serta adanya keterbukaan antar stakeholders.

Program upaya pendampingan belajar siswa mendapatkan dukungan yang luar biasa khususnya dari ibu-ibu. Dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan pendampingan belajar dilakukan pada lokasi yang disepakati bersama. Pada waktu-waktu tertentu, kegiatan ini juga didampingi oleh orang tua khususnya ibu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran proses pendampingan belajar yang dilakukan. Selain itu, diharapkan ibu-ibu bisa menerapkan metode yang sama saat siswa belajar di rumah.

Partisipasi pada kegiatan usaha mikro masyarakat dilihat dari jumlah masyarakat yang menjadi mitra pada kegiatan Toko Tani Indonesia Center yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Dinas Koperasi dan UMKM mengutamakan menyediakan pasokan pangan dari petani perempuan. Tujuannya agar petani perempuan semakin berdaya di tengah kondisi pandemi.

4. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Proses kolaborasi ini dilihat dari dialog antar muka yang dilakukan oleh stakeholders yang terlibat serta pemahaman semua aktor terkait peran yang harus dilakukan dengan baik.

Pada kolaborasi pendampingan proses belajar dan usaha mikro masyarakat diawali dengan pertemuan awal antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan Universitas Andalas serta antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan Kelompok Tani Perempuan. Tujuan awal pertemuan ini adalah merumuskan bentuk

kolaborasi dan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Pada pertemuan awal ini juga diuraikan dan diidentifikasi kondisi setiap stakeholder. Tujuannya adalah agar dapat menyusun kegiatan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Padang masa pandemi.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa upaya kerjasama yang akan dilakukan dibuat dengan tujuan pemberdayaan perempuan. Yaitu, ibu-ibu yang memiliki anak usia SD yang juga berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Pertimbangannya adalah agar proses pendidikan anak-anak SD yang harus dilakukan di rumah akan terus berjalan baik sementara ibu tetap bisa bekerja mencari nafkah keluarga. Dilain hal, perempuan yang bekerja sebagai petani dan menjadi penghasil produk pangan namun kesulitan dalam mendistribusikan produk pangan akibat menurunnya daya beli masyarakat, akan dijadikan mitra program Toko Tani Indonesia Center. Tujuannya agar tetap produktif dan berdaya dalam memasarkan produk usahanya.

Dari variabel *collaborative governance* yang ditawarkan oleh Ansell and Gash maka terlihat bahwa Pemerintah Kota Padang telah melakukan kolaborasi dengan stakeholder berupa Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat. Kriteria dalam melakukan kolaborasi tersebut adalah setiap program dan kegiatan kolaborasi yang dilakukan bisa memperdayakan perempuan pada masa pandemic covid-19 di Kota Padang.

KESIMPULAN

Temuan di lapangan dan analisis terhadap data serta informasi yang didapatkan maka disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah mengupayakan penerapan *Collaborative Governance* sebagai salah satu cara menghadapi berbagai macam dampak yang timbul akibat pandemi covid-19. Salah satu dampak yang dirasakan adalah semakin bertambahnya peran yang harus dilakukan oleh perempuan atau istri. Peran tersebut adalah mendampingi proses belajar anak di rumah dan sebagai pencari nafkah tambahan bahkan nafkah utama.

Menghadapi kondisi tersebut, maka perlu memberdayakan perempuan agar bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik serta tetap bisa

menjaga kesehatan mental atau psikisnya. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan membangun kerjasama dan melibatkan aktif stakholder sesuai dengan bidang dan keahliannya. Untuk bidang pendampingan pembelajaran, sebagai leading sektor maka Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui melibatkan aktif mahasiswa yang sedang menjalankan KKN untuk menjadi pendamping kelompok belajar bagi siswa sekolah dasar. Pendampingan juga diberikan kepada perempuan yang terdampak seperti sebagai pencari nafkah utama. Pendampingan ini berupa pelatihan ketrampilan dan informasi mengenai menjaga kesehatan mental dan psikologis pada masa pandemi.

Bidang ekonomi melalui usaha ekonomi mikro, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menjadi leading sektor dan berkolaborasi dengan masyarakat petani perempuan untuk mendistribusikan hasil panen dan ternak pada Pasar Tani Center.

Berbagai macam upaya kolaborasi dengan berbagai unsur, akademisi, tenaga ahli dan masyarakat yang dibangun oleh Pemerintah Kota Padang bertujuan untuk memberdayakan perempuan khususnya para ibu dengan peran ganda. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa upaya kolaborasi tersebut dirasa cukup berhasil membuat perempuan lebih berdaya, mandiri secara ekonomi dan sehat secara psikologis.

Melihat perkembangan di lapangan maka untuk kedepannya upaya kolaborasi seperti ini bisa lebih diperluas lagi sektor kajiannya tidak hanya sebatas bidang pendidikan dan usaha mikro saja.

REFERENCES

- Agustina, E., Ernawati, Irvita, M., & Putri, C. P. (2021). Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 01(01)*, 89–100.
- Dampak Covid-19, Warga Miskin Padang Bertambah 144 Ribu Jiwa — Lintas Sumbar.* (n.d.). Retrieved April 20, 2022, from <https://www.lintassumbar.co.id/2020/06/dampak-covid-19-warga-miskin-padang-bertambah-144-ribu-jiwa.html>
- DP3APKB Kota Padang, P. K. (2019). *Renstra Dp3Ap2Kb 2019-2024*.

- Dzulfikri Muhammad, R. (2021). Implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di Kota Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 294–310. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2767>
- Isnani Setyaningsih Sri Isnani Setyaningsih Sri Isnani Setyaningsih, S., & Islam Negeri Walisongo Semarang, U. (2015). BIAS GENDER DALAM VERBA: Sebuah Kajian Leksikon dalam Bahasa Inggris. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 25–50. <https://doi.org/10.21580/SA.V11I1.1445>
- Khiftiyah, M., & Nilamsari, W. (n.d.). PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM USAHAPENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3. <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1024>
- Konsep Gender Bias dan Praktik serta Kondisi dalam Lingkup Bisnis di Indonesia – Srikandi BUMN Indonesia*. (n.d.). Retrieved April 20, 2022, from <https://srikandibumn.org/2021/07/gender-bias-dan-praktik-serta-kondisi-dalam-lingkup-bisnis-di-indonesia/>
- Luh, N., & Dewi, Y. (2019). Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(2). <https://journal.undiknas.ac.id>
- Nurani Perempuan Catat Sepanjang 2021 Angka KDRT dan Kekerasan Seksual di Padang Meningkat - Haluan Padang. (n.d.). Retrieved April 20, 2022, from <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1062313519/nurani-perempuan-catat-sepanjang-2021-angka-kdrt-dan-kekerasan-seksual-di-padang-meningkat>
- Nurmina, N., Netrawati, N., & Rinaldi, R. (2020). Pelatihan Manajemen Stres dan Relaksasi Bagi Ibu Rumah Tangga Terdampak Covid 19 di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota Padang. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 2(2), 150. <https://doi.org/10.30872/plakat.v2i2.4972>
- Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 93–108. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1524>
- Sitanggang, G. (2021). Pengembangan metode e-learning dalam mendukung motivasi belajar mahasiswa. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11, 241–253.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.